



# RUU IKN: Perspektif Ekonomi dan Pemerintahan

**Dr. Anggito Abimanyu, MSc.**

- Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM dan FEB-UGM, 1995-saat ini.
- Kepala Badan Pelaksana-Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 2017-2022
- Kementerian Keuangan RI (2000-2010)
- Kementerian Agama RI (2012-2014)

# POLA IKN DI DUNIA; Perspektif Ekonomi



**Penggabungan  
Pemerintahan dan  
Ekonomi**

Inggris, Thailand,  
Korea, Jepang,  
Filipina, Vietnam,  
Indonesia (Jakarta)



**Pemisahan  
Pemerintahan dan  
Ekonomi**

AS, Australia, New  
Zealand, Belanda,  
Turkey, Brazil, Afrika  
Selatan



**Pengembangan  
Ibu Kota**

Malaysia, Brunei



**Keseimbangan Pusat  
Ekonomi**

China, India, Arab  
Saudi

**IKN Indonesia (2024) kemana?**

# BENCHMARKING IMPACT dari Ibu Kota Baru dari Negara Brazil

## Rio de Janeiro -> Brasilia (1960)

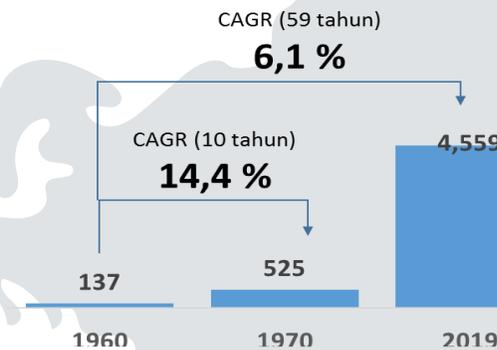
### Peningkatan populasi Brasilia



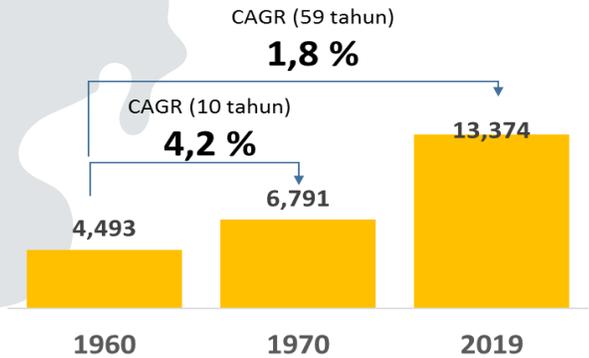
Tahun	Jumlah Populasi (orang)
1955	69.669
1960	136.643
2019	4.558.991

10 tahun awal pasca pemindahan ibu kota, **pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4%** dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya **4,2%**

Sumber: Brazilian Institute of Geography and Statistics, World Urbanization Prospects



Jumlah penduduk Brasilia (ribu jiwa)



Jumlah penduduk Rio de Janeiro (ribu jiwa)



Efek pengganda output sebesar **2.93**



Efek pengganda lapangan kerja

1.7 pekerjaan swasta tercipta dari setiap penambahan pekerjaan di sektor publik

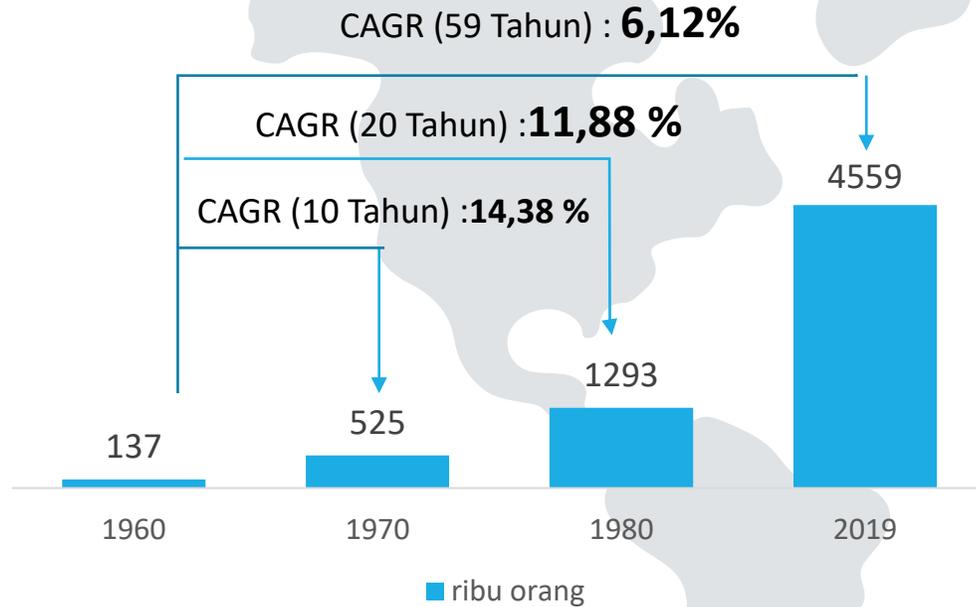
Quistorff, B (2015). Capitalitis? Effects of the 1960 Brazilian Capital Relocation. *SSRN Electronic Journal*.

# BENCHMARKING IMPACT dari Ibu Kota Baru dari Negara Brazil

Brazil

Rio de Janeiro -> Brasilia (1960)

Peningkatan populasi di Brasilia



Sumber : Population Stat

10 tahun awal pasca pemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai **14,38%**.

# **BENCHMARKING IMPACT** dari Ibu Kota Baru Dari Negara Kazakhstan

## Pra dan Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara Kazakhstan dari Almaty ke Astana



Adanya ketegangan intra etnis (serta Intra etnis Kazakhs) dan ketimpangan etnis.



Hubungan intra etnis Kazakhs semakin erat di wilayah Utara. Ketimpangan etnis berkurang setelah pindah ke Astana



Ibu kota lama jauh dari bagian negara lain sehingga membatasi akses ke ibu kota



Astana lebih mudah dijangkau dari bagian negara lain Kazakhstan.



Tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di bagian utara.



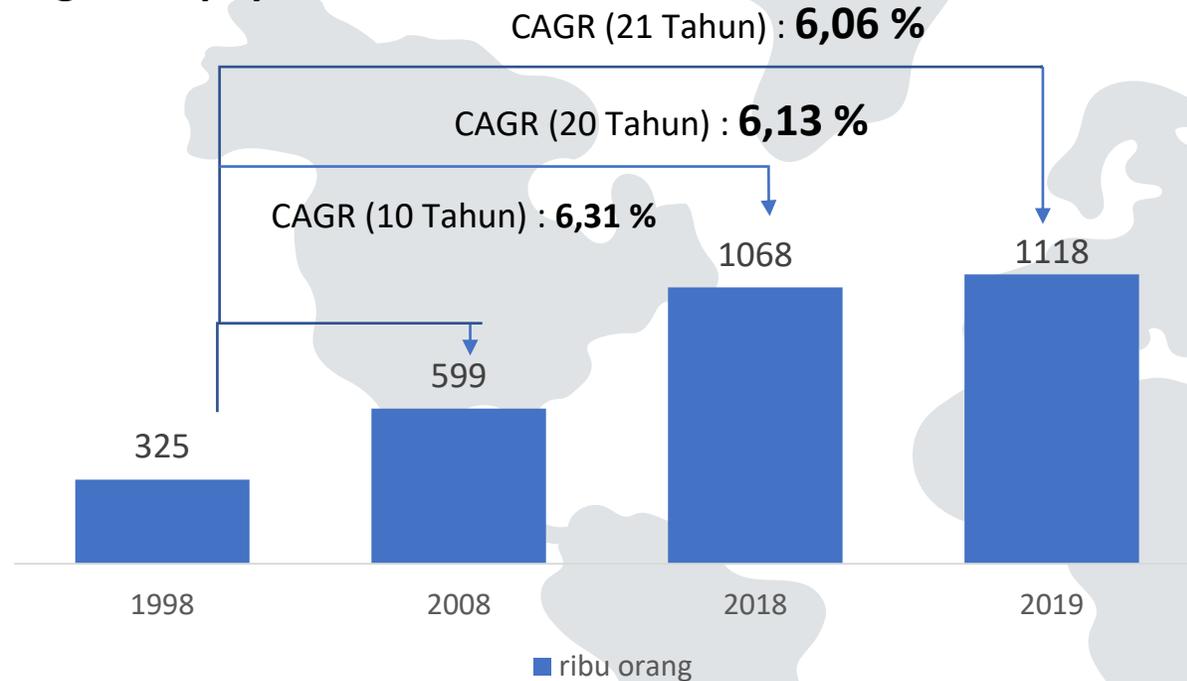
Pemindahan Ibu kota memacu pembangunan nasional dan wilayah. Tingkat kemiskinan turun dari 46,7% di 2001 menjadi 2,5% di 2017.

# BENCHMARKING IMPACT dari Ibu Kota Baru dari Negara Kazakhtan

Kazakhstan

Almaty -> Astana (1998)

## Peningkatan populasi di Astana



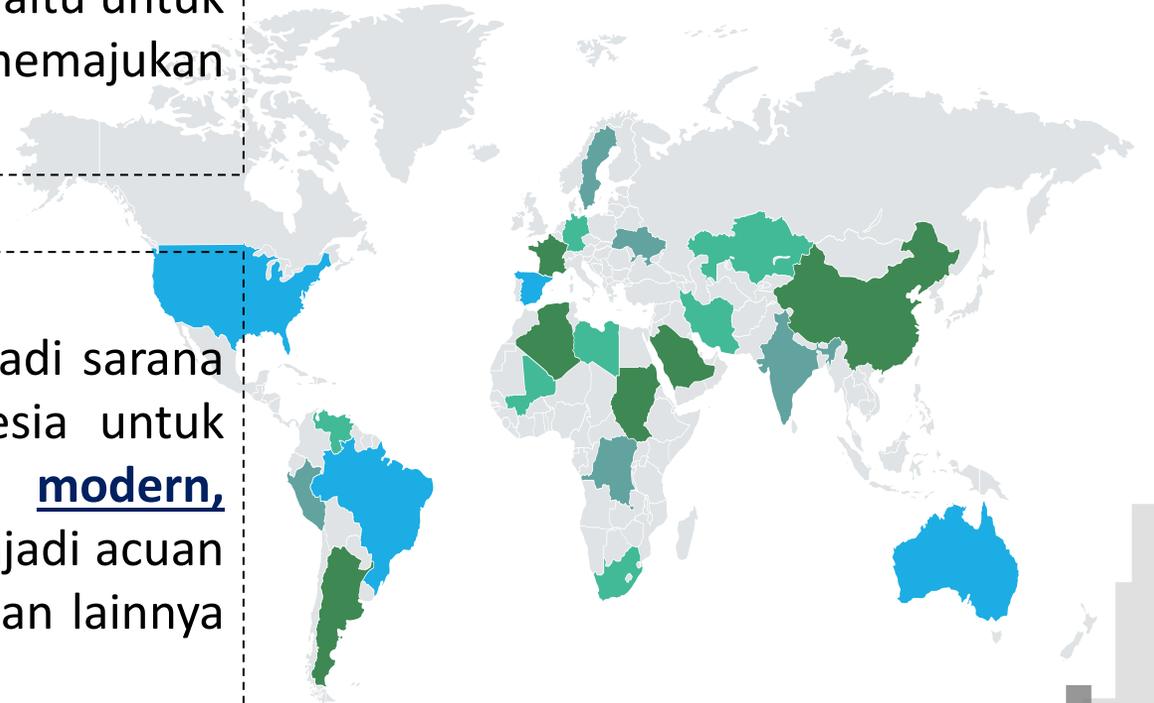
10 tahun awal pasca pemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Astana per tahun mencapai **6,31%**

Sumber : Population Stat

# IKN: Aspek Ekonomi dari Konsideran Menimbang RUU

b. bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum;

d. bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia;



# Visi dan Prinsip

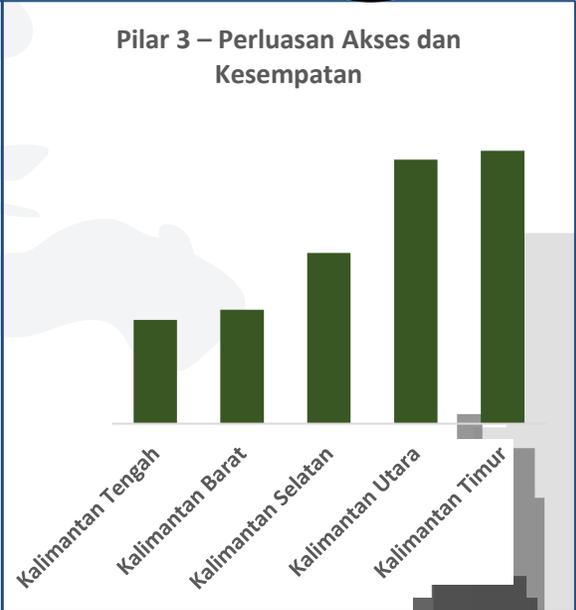
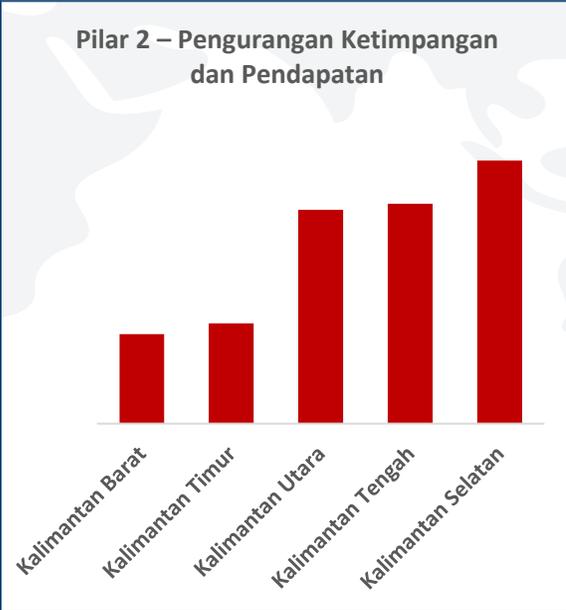
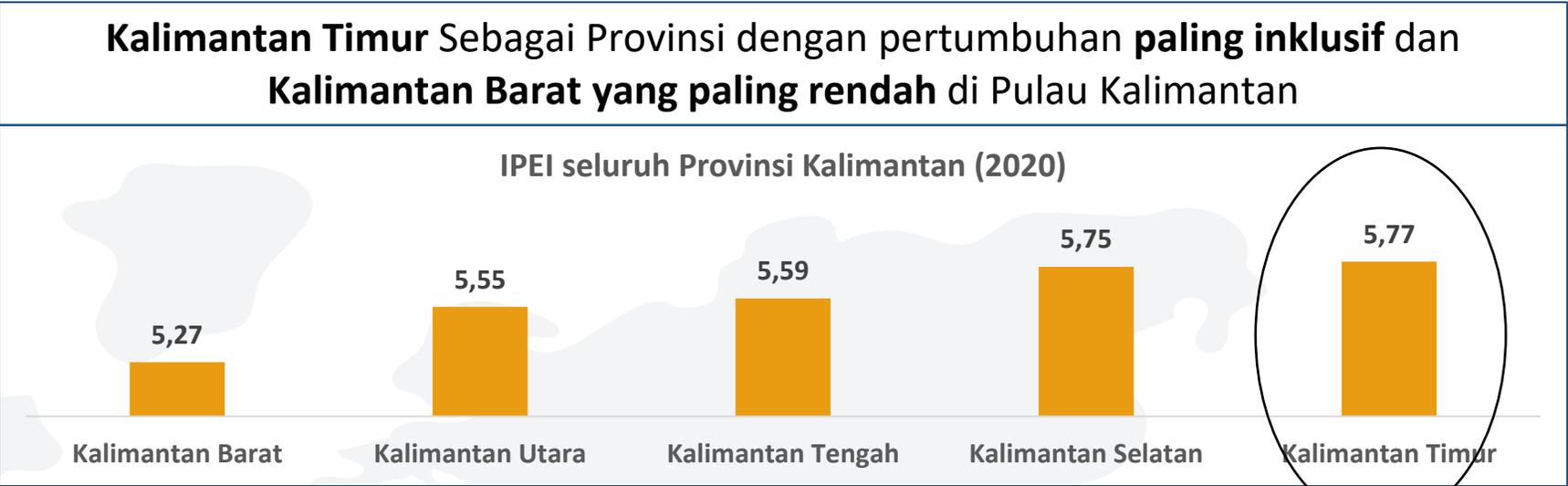
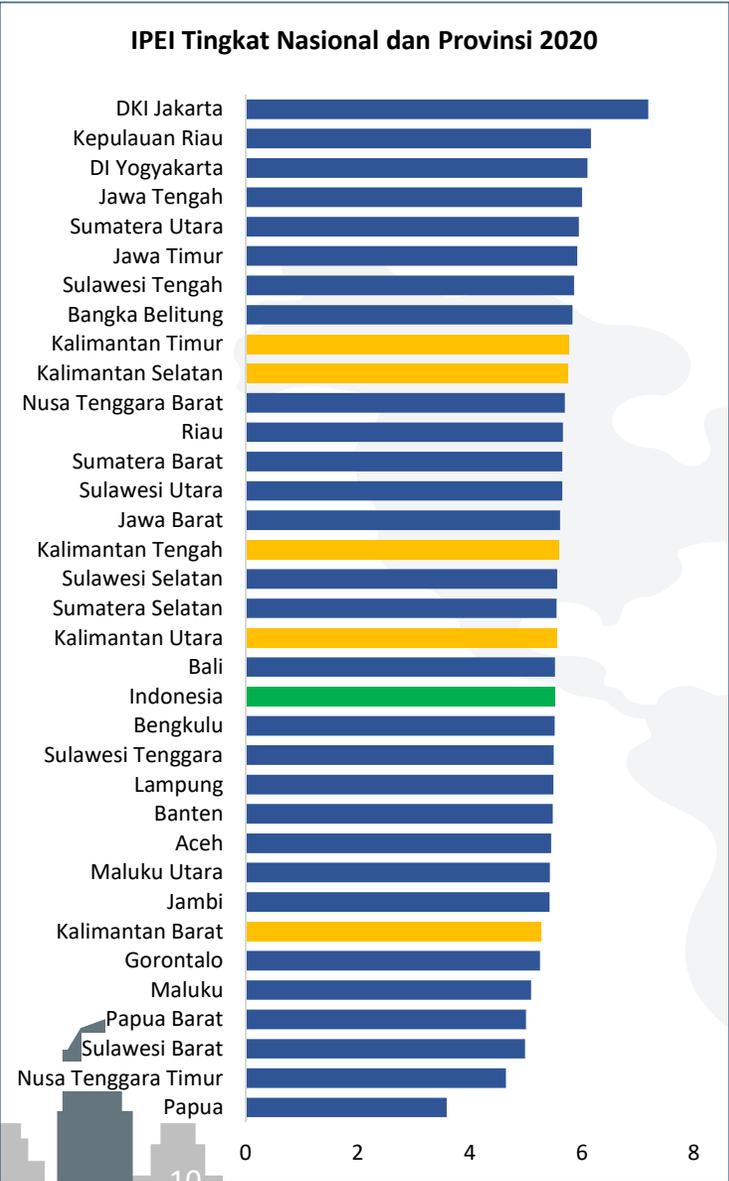
## Pasal 5

- IKN [...] memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, kota sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta kota yang menjadi simbol identitas nasional dan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Visi IKN [...] akan diterapkan melalui prinsip pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara yang mengacu kepada Rencana Induk IKN.

## Penduduk, PDB dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pulau, 2021

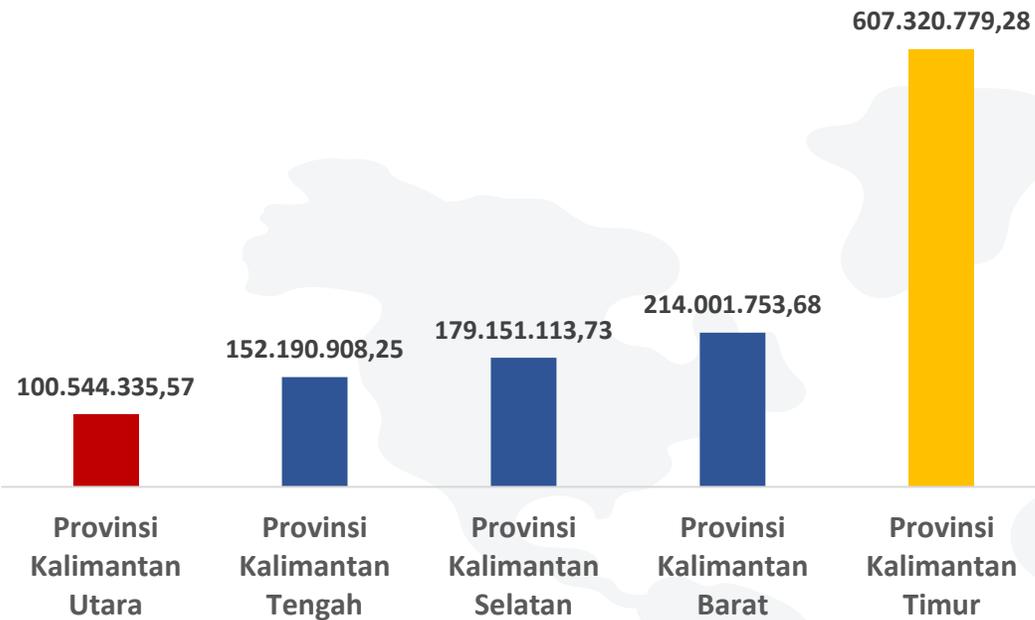
No	Pulau	Penduduk	PDB	Pertumbuhan Ekonomi
1	Jawa	56%	57%	3,7%
2	Sumatera	22%	22%	3,03%
3	Kalimantan	6%	8%	4,5%
4	Sulawesi	7%	7%	4,5%
5	Bali dan NT	6%	3%	-0,09%
6	Maluku dan Papua	3%	2%	9,1%

# Pembangunan Ekonomi Inklusif di Pulau Kalimantan



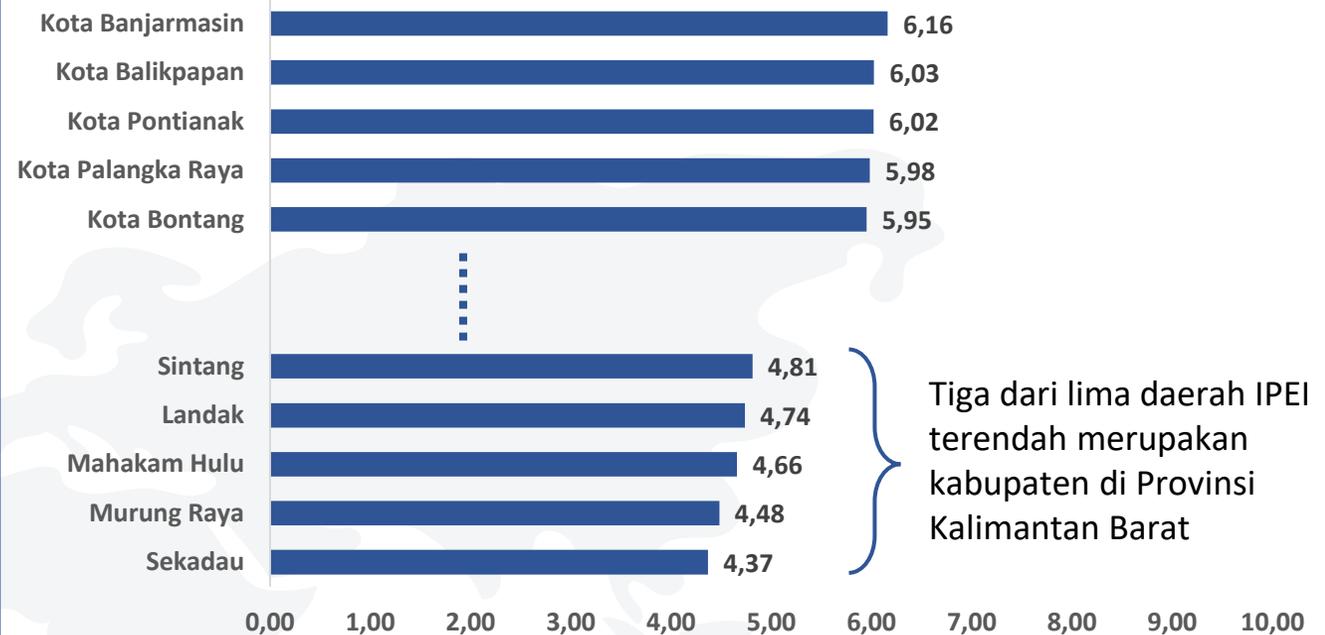
# Pembangunan Ekonomi Inklusif di Pulau Kalimantan

PDRB ADHB Provinsi di Pulau Kalimantan 2020 (Juta Rupiah)



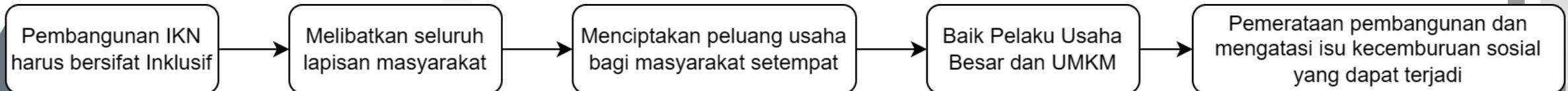
Berdasarkan data PDRB 2020, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan masih terkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Timur

IPEI Kabupaten di Pulau Kalimantan (2020)



Wilayah perkotaan mendominasi nilai IPEI tertinggi. Meskipun PDRB Kalbar tertinggi setelah Kaltim, banyak kabupaten provinsi tersebut yang memiliki nilai IPEI rendah

## Pemindahan IKN dapat mengadopsi konsep pembangunan ekonomi inklusif untuk mengurangi ketimpangan di Pulau Kalimantan



# Syarat menjadi IKN dan Pemindahan IKN

1. Aman dari bencana secara geologis dan geografis
2. Pertimbangan kepadatan Penduduk Rendah
3. Ketersediaan kualitas SDM memadai
4. Ketersediaan Infrastruktur Eksisting Cukup (*hard dan skill*)
5. Analisis Manfaat dan Biaya Ekonomi dan Fiskal, inklusif dan layak
6. Masalah sosial dan budaya, beragam dan terbuka

# Pertimbangan IKN

No	Pertimbangan	Jakarta (IKN Lama)	Wil Kaltim (IKN Baru)
1.	Rawan Bencana Alam dan Banjir	Tinggi	Rendah
2.	Kepadatan Penduduk	Tinggi	Rendah
3.	Kelengkapan Infrastruktur	Bagus	Memadai
4.	Kemampuan SDM dan Teknologi	Bagus	Kurang
5.	Potensi Ekonomi dan SDA	Cukup	Melimpah
6.	Sosial-Budaya	Beragam	Beragam



# Urusan Pemerintahan Otoritas IKN (Bab III)

- ❖ Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Otorita IKN adalah lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...].
- ❖ Kepala/Wakil Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Kepala Otorita IKN adalah pimpinan Otorita IKN yang berkedudukan setingkat menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...].

## **Komentar:**

Kepala/Wakil Kepala Otorita ditunjuk oleh Presiden? Berkedudukan setingkat Menteri? Sebagai pemilih wilayah/daerah apakah tidak dilakukan pemilihan seperti layaknya Pemilihan Gubernur? Perlu ada ketentuan transisi?

# Rencana Induk IKN (bagian Keenam)

- ❖ Rencana Induk Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Rencana Induk IKN adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...].
- ❖ Rencana Induk IKN diatur dalam Peraturan Presiden

## **Komentar:**

Apa peran DPR atau DPRD dalam RI-IKN. Menyangkut hajat hidup orang banyak (?)

# Komentar mengenai RUU IKN:

1. **Konsideran Menimbang:** pertimbangan IKN adalah (cukup) Pemerintahan yang modern, aman, stabil dan inklusif.
2. **Visi IKN:** Ibukota negara yang modern dan melayani kepentingan nasional, serta menjadi pusat pemerintahan (usulan revisi). Penggerak ekonomi Indonesia (?)—pasal 5
3. **Bentuk dari IKN:** Otoritas vs Daerah Khusus vs Propinsi vs Daerah Istimewa. Dipimpin oleh Kepala/Wakil kepala Otoritas setingkat Kementerian. Kekhususan dan keistimewaan yang diperoleh dalam pengelolaan aset, tanah dan keuangan (sesuai ketentuan yang berlaku).
4. **Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Otorita:** Bentuk Otoritas terkait dengan Kementerian atau Kewilayahan? Merupakan kewenangan Eksekutif/Presiden atau tidak ada pilihan langsung seperti Pilgub, Perlu masa transisi?
5. **Rencana Induk IKN:** merupakan kewenangan Eksekutif murni atau perlu ada persetujuan, masukan dan pertimbangan dari Legislatif
6. **Keterbatasan APBN dan APBD serta analisis manfaat dan biaya IKN:** kebijakan fiskal perlu menjadi bagian dari RI-IKN. Ada pungutan khusus IKN (pasal 24). Tidak ada peran APBD/DPRD dalam aset dan keuangan.
7. **Transisi Status Pemprov DKI sebagai;** Undang-undang (UU) 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dicabut? Pemprov DKI dirubah statusnya sejak berdirinya IKN menjadi Pemprov seperti yang lain.



**TERIMA KASIH**





# Lampiran

# Dampak Pemindahan IKN terhadap Indikator Makro

## Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur



### Menarik Investasi Swasta

Persentase realisasi PMDN 2020 di **pulau Kalimantan** dibandingkan dengan Indonesia sebesar **10,98%**, sedangkan di **Pulau Jawa** mencapai **51,85%**.

Investasi swasta akan menjadi mesin penggerak bagi sektor-sektor baru untuk tumbuh di Kalimantan.



### Meningkatkan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi

Peranan ekspor industri pengolahan terhadap total ekspor **Kalimantan Timur** sebesar **18,01%**, sedangkan **Jawa Barat** mencapai **98,56%**.

Industrialisasi diharapkan akan tumbuh, sehingga terjadi hilirisasi produk primer di Kalimantan. Kedepannya, produk ekspor Kalimantan memiliki nilai tambah yang tinggi.



### Memberi Dukungan terhadap Logistik dan Transportasi

Terdapat **8 Bandara Internasional** di Kalimantan

Sedangkan untuk **Pelabuhan Internasional** hanya ada **1**, yakni Pelabuhan Kijing.

Infrastruktur akan massif dibangun, sehingga dapat mendukung ekspor dan memperlancar arus mobilisasi penduduk.

## Pemindahan IKN dapat Menurunkan Ketimpangan antar Wilayah



Ketimpangan wilayah di antara Barat dan Timur Indonesia masih terjadi.



Sehingga membuat daerah Indonesia Timur menjadi lebih mudah mengejar ketertinggalan dari daerah lain

*Akan terjadi konvergensi saat IKN pindah ke Kalimantan Timur*

Perpindahan IKN akan membantu **mengubah struktur perekonomian, menarik industri baru yang bernilai tambah tinggi, serta menjadi pusat perekonomian baru** di Kawasan Indonesia Timur secara umum dan Kalimantan Timur secara khusus.